

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Selama periode tahun anggaran 1994/1995 hingga tahun 2013, perkembangan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,04 persen, 18,85 persen dan 20,34 persen. Sedangkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kota Bandar Lampung selama periode tahun anggaran 1994/1995-2013 masih rendah yaitu sebesar 17,11 % dan dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan.
2. Hipotesis yang menyatakan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung secara statistik dapat diterima. Hal ini berdasarkan dari hasil uji F didapat hasil besarnya pengaruh ketiga variabel ini sebesar 64,3% dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Secara parsial (Uji t) pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung.
3. Variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang paling besar, hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel ini sebesar 0.410. Pengaruh variabel yang cukup besar lainnya ditunjukkan oleh variabel retribusi daerah yaitu sebesar 0.252. Variabel berikutnya yang berpengaruh

terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung adalah variabel dana bagi hasil sebesar 0.109.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Prosentase kenaikan tarif pajak daerah bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan karena kenaikan tarif pajak daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dan metode menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif sehingga pendapatan dari sektor pajak dan sektor retribusi daerah cukup besar. Dan yang terpenting adalah meningkatkan kepatuhan (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
3. Meskipun dana bagi hasil bukan yang utama pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah tetapi dana bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu

modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU. Sehingga Setiap daerah dituntut untuk secara intensif menggali potensi yang ada karena penerimaannya didasarkan oleh potensi daerah penghasil. Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.